

**ANALISIS KREDIT SIMPAN PINJAM KELOMPOK
PEREMPUAN (SPKP) DI KECAMATAN
KWANDANG KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

OLEH
AFRIANI HASRUN AUNA
E11.16.122

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KREDIT SIMPAN PINJAM KELOMPOK
PEREMPUAN (SPKP) DI KECAMATAN
KWANDANG KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

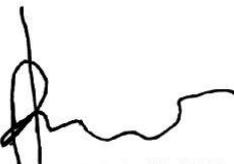
OLEH
AFRIANI HASRUN AUNA
E11.16.122

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 20 Mei 2020**

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Arlawan, S.P.si, SE, MM
NIDN 0922057502

Pembimbing II



Afriana Lomagio, SE, M.Ak
NIDN 0929049203

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KREDIT SIMPAN PINJAM KELOMPOK
PEREMPUAN (SPKP) DI KECAMATAN
KWANDANG KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

OLEH
AFRIANI HASRUN AUNA
E11.16.122

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Juli 2020

Komisi Penguji :

1. Dr. Darnawati, M.,Si
2. Dr. Bala Bakri SE., MM
3. Fitrianti SE, M.Ak
4. Dr. Ariawan, S.Psi., SE., MM
5. Afriana Lomagio, SE., M.Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM
NIDN 0922057502

Ketua Program Studi Akuntansi

RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 20 April 2020

Yang membuat pernyataan



(Atriani Hasrun Auna)
NIM. E11.16.122

KATA PENGANTAR

Segala puja, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah melengkapkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah memperjuangkan agama islam dan ajarannya didunia ini yang akan dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Pembimbing dan Anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan baik moral dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan terganti oleh siapapun.

Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Si., C.Sr, Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan SE., MM., selaku Dekan Fakultas dan selaku pembimbing I dan , Ibu Afriana Lomagio, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini, Bapak Ibu dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, 20 April 2020



AFRIANI HASRUN AUNA

DAFTAR ISI

Teks	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Pustaka	8
2.1.1 Pengertian Pinjaman	9
2.1.2 Kredit	10
2.1.3 Modal	20
2.1.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)	24

2.1.5 Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)	28
2.1.6 Peranan Perempuan dalam Usaha Mikro.....	32
2.2 Penelitian terdahulu.....	34
2.3. Kerangka Pikir	36
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian.....	37
3.2 Metode Penelitian	37
3.3 Operasional Variabel	38
3.4 Pendekatan Penelitian	40
3.5 Informan Penelitian.....	41
3.6 Sumber Data.....	43
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.8 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	49
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Teks	Halaman
1. Tabel Penelitian Terdahulu	34
2. Tabel Operasional Variabel.....	38
3. Tabel Informan.....	41

DAFTAR GAMBAR

Teks	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	36

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Program Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Hasil Penelitian ini bahwa dilihat (1) Sistem Pemberian Kredit pada SPKP di Kecamatan kwandang bahwa sistem pemberiannya itu dilakukan melalui beberapa alur yakni mulai dari idnetifikasi, verifikasi, mengklarifikasi dan terkair menyalurkan dana, (2) Mengetahui Kesungguhan Nasabah Melunasi Hutangnya di SPKP di Kecamatan kwandang bahwa kesungguhan ini dinilai pada saat dilakukan interview atau wawancara. Dari pernyataan peminjam akan timbul rasa percaya oleh tim pengelola. (3) Jaminan Hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan untuk SPKP di Kecamatan kwandang bahwa jaminannya ini akan diperlihatkan pada saat mengajukan, jaminan ini juga nilainya harus lebih tinggi dari pinjaman. (4) Penilaian Kondisi atau prospek Bidang Usaha yang dibiayai pada SPKP di Kecamatan kwandang bahwa penilaian ini akan dilihat pada proposal pengajuan pinjam oleh peminjam. (5) Tanggungjawab dalam pinjaman untuk SPKP di Kecamatan kwandang bahwa tanggungjawab ini dilakukan oleh ketua kelompok

Kata Kunci : Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Maslah

Kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal sepanjang sejarah Negara Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan dan menjadi persoalan yang besar bagi perkembangan bangsa. Persoalan kemiskinan ini telah menyebabkan jutaan anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya perhatian khusus yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan, karena lapangan pekerjaan semakin minim dan jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, serta kurangnya jaminan sosial oleh pemerintah terhadap perlindungan masyarakat miskin yang menyebabkan jutaan rakyat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara terbatas.

Keterlibatan pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis, karena diperlukan suatu kebijakan yang dapat melahirkan suatu program atau kegiatan pembangunan secara terpadu antar pertumbuhan dan pemerintah, termasuk didalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah dengan mengikuti sertakan peran istri. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan juga

memiliki sejumlah potensi yang jika dikembangkan maka akan dapat menunjang kelangsungan hidup sehari-hari. Peran serta perempuan sangat penting dan diperlukan guna peningkatan perekonomian rumah tangga, yang semuanya dapat diwujudkan hanya dengan kesadaran yang tulus dari diri perempuan itu sendiri.

Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan bangsa hakekatnya meliputi upaya untuk meningkatkan kedudukan, peranan, kemampuan kemandirian serta ketahanan mental dan spiritual perempuan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu (Narwoko, 2014) :

1. Peningkatan kedudukan perempuan dimaksudkan agar perempuan makin berperan aktif sebagai subyek pembangunan di samping sebagai objek pembangunan.
2. Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan dimaksudkan agar perempuan dapat memberikan sumbangan yang optimal bagi pembangunan bangsa, dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya.
3. Peningkatan kemampuan perempuan dimaksudkan agar perempuan dapat mengembangkan diri secara optimal sehingga makin meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilannya.
4. Peningkatan kemandirian perempuan dimaksudkan agar perempuan makin memiliki keyakinan dan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada dalam diri dan lingkungan

sekitarnya, serta mampu menentukan apa yang terbaik bagi diri, keluarga, masyarakat dan bangsanya.

5. Peningkatan ketahanan mental dan spiritual dimaksudkan agar perempuan dapat lebih mantap memanfaatkan kesempatan berperanaktif dalam segenap kegiatan pembangunan seerta mampu menghadapi perubahan-perubahan baik di dalam masyarakat maupun di dunia internasional, dengan tetap bertumpu pada ajaran agama dan nilai luhur budaya bangsa berdasar Pancasila.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, maka pemerintah mengupayakan pembangunan di segala bidang, termasuk di dalamnya pembangunan masyarakat pedesaan. Pembangunan di bidang itu diharapkan juga melibatkan perempuan. Permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah upaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang rapuh akibat diterpa krisis ekonomi yang berkepanjangan pada tahun 1998.

Lambatnya pemulihan ekonomi menimbulkan dampak krisis multi dimensi, yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang ada di Indonesia. Hal tersebut berdampak pula pada daya tarik investasi bagi pemodal asing yang meninggalkan Indonesia akibat rendahnya etos kerja dan kreatifitas masyarakat serta banyaknya terjadi kerusuhan di beberapa daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa karakteristik demografi masyarakat Indonesia adalah sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, sudah selayaknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya program pembangunan pedesaan merupakan langkah yang paling

strategis. Karena hal tersebut akan berhubungan langsung dengan permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat, sumber daya alam spesifik dan potensial, karakteristik sosial budaya masyarakat setempat, sehingga kemanfaatan pembangunan lebih dapat dirasakan.

Kini pemerintah pusat mengeluarkan program baru yang sasarannya bukan untuk masyarakat secara individu, tetapi membangun infrastruktur umum untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus pemberdayaan semua masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga diharapkan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Program ini dikemas lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program PNPM Mandiri ini juga telah terlaksana di sejumlah daerah-daerah provinsi Gorontalo khususnya diDesa Bualemo Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dalam hal ini membantu perekonomian pedesaan. Program PNPM Mandiri ini meluncurkan Koperasi Simpan Pinjam Bagi Perempuan untuk membantu para ibu rumah tangga dalam meningkatkan usaha kecil menengah. (Sumber Data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM).

Sebelum adanya program simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) di Desa Bualemo, permodalan yang ditawarkan kepada usaha mikro kecil kelompok perempuan ini antara lain kredit modal kerja dari perBANKan. Namun, persyaratan pinjaman yang tidak mudah dan bunga yang cukup tinggi membuat usaha mikro kecil sangat jarang dilirik oleh perBANKan. Melalui program simpan pinjam perempuan maka ada alternatif permasalahan permodalan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil perempuan.

Adapun contoh usaha kecil seperti usaha tani dengan tanah perseorangan dan memiliki tenaga kerja, pedagang grosir, industri makanan dan minuman alat rumah tangga, kerajinan tangan dan peternakan. Berdasarkan jenis usahanya, UKM dibedakan dalam 3 kategori, yaitu manufaktur dimana jenis pekerjaan dengan mengubah bahan dasar menjadi produk yang bisa dikonsumsi atau digunakan pemakai. Misalnya toko furniture menghasilkan mebel atau perusahaan konveksi memproduksi pakaian. Berikutnya adalah usaha dagang, Pekerjaan ini menjual segala jenis produk kepada konsumen. Contoh toko kelontong, toko kue basah dan lain seagainya. Dan terakhir adalah jasa, biasanya berbentuk pelayanan. Misalnya pengiriman barang ke luar kota seluruh Indonesia, membuka warung internet dan lain sebagainya.

Program simpan pinjam perempuan dialokasikan maksimal 25% dari total BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Apabila dana untuk program simpan pinjam perempuan tidak terserap habis maka akan dijadikan dana kegiatan lainnya yang mendukung usaha mikro kecil kelompok perempuan seperti pengadaan dana untuk kegiatan umum, dll.

UKM yang berada di Desa Bualemo ada berbagai macam jenisnya mulai dari pedagang sembako, penjual kue, usaha tani, pedangan kayu, penjual furniture dan jasa lainnya. Usaha Kecil Menengah yang ada di Desa Bualemo rata-rata meminjam modal usaha untuk dapat bertahan dan berkembang. Adapun peminjam modal usaha mereka melalui program Simpan Pinjam Bagi Perempuan sebagai upaya pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga untuk membantu perekonomian

keluarga. Pemberian modal melalui program ini diberikan dengan sistem bergilir bagi usaha mikro kecil kelompok perempuan.

Hal lain juga masih kurangnya kreativitas ibu rumah tangga dalam meningkatkan usaha untuk membantu perekonomian rumah tangga dan kurang produktifitas serta rendahnya partisipasi perempuan dalam program simpan pinjam bagi perempuan menjadi faktor permasalahan yang sering dihadapi. Untuk itu program pemerintah melalui PNPM Mandiri Pedesaan harus lebih mengembangkan dan meningkatkan peminjaman modal usaha dan mensosialisasikan pentingnya program simpan pinjam bagi perempuan kepada khalayak umum agar masyarakat tertarik untuk membuka usaha diberbagai bidang dan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Bualemo khususnya.

Pada tahun 2015, modal dari program simpan pinjam perempuan diberikan sebesar Rp. 190.000.000,-, pada tahun 2016, modal dari program ini diberikan sebesar Rp. 210.000.000,- dan tahun 2017 menurun menjadi Rp. 167.000.000, yang semua dana di berikan kepada 10 usaha mikro kecil yang tersebar di 4 dusun yang ada di Desa Bualemo. Dari uraian pemberian modal ini dapat dilihat adanya tingkat penurunan modal yakni pada tahun 2017, penyebab permasalahannya yakni di sebabkan oleh tingkat pengembalian kredit yang telah diberikan kepada peminjam macet.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menjadikan dasar pilihan untuk menggali program Koperasi Simpan Pinjam Bagi Perempuan atau lebih tepatnya

Analisis Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka masalahnya dapat dirumuskan “Bagaimana Program Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Program Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan baik dalam bidang kewirausahaan khususnya usaha kecil menengah dan bidang akuntansi khususnya sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit.

2. Manfaat Praktis,

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi dan pihak terkait yakni pihak PNPM sebagai pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan mengenai pelaksanaan program SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) di Desa Bualemo Kecamatan Kwandang,

- b) Sebagai motivasi perempuan/ibu rumah tangga untuk meningkatkan kualitas hidup, motivasi untuk pengelola SPKP.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1.Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Pinjaman

Pinjaman dapat disamakan dengan kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2010:96).

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman atau kredit adalah pinjaman uang yang diperoleh dari pihak tertentu dan pengembaliannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang,

2. Kesepakatan, disamping unsur percaya, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani baik hak maupun kewajibannya,
3. Jangka waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk kredit jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang,
4. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu bresiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit,
5. Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga (Kasmir,2010:99).

2.1.2. Kredit

2.1.2.1. Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2016:73) tentang kredit :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2016:73) tentang kredit:

“Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

2.1.2.2. Unsur-unsur Kredit

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur–unsur kredit (Kasmir, 2014) tersebut adalah

- a. **Kepercayaan.** Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
- b. **Kesepakatan.** Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing–masing.
- c. **Jangka waktu.** Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek

(dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

d. **Risiko.** Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

e. **Balas jasa.** Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

Kasmir (2014:85), kredit berasal dari bahasa latin, “credere” yang bahwa kredit artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada di penerima kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.

Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2014), adalah:

1. Kepercayaan yaitu adanya keyakinan pemberian kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu dimasa datang.
2. Kesepakatan, disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko, adanya suatu tanggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

2.1.2.3. Tujuan Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut (Kasmir, 2014:88) adalah sebagai berikut:

- a. **Mencari keuntungan.** Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah.
- b. **Membantu usaha nasabah.** Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. **Membantu pemerintah.** Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

Fungsi kredit menurut Kasmir (2014:89), antara lain:

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna atau bermanfaat.

2.1.2.4. Fungsi Kredit

Organisasi bank dalam kehidupan perekonomian yang moderen, banyak memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu di ikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter. Hal ini menyebabkan, bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

- a) Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
- b) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna peredaran barang.
- d) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

- e) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
- f) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g) Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional.

Menurut Kasmir (2013:117-119) fungsi kredit sebaai berikut:

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit saat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya.

3. Untuk meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat dipergunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna.

4. Meningkatkan peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memenang modalnya pas-pasan.

Menurut Kasmir (2012:116) dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai kredit:

a. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biasa administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

c. Membantu pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dalam rangka meningkatkan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor ril.

2.1.2.5. Jenis Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kredit. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat.

Pemberian kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Kredit dapat dibedakan menjadi lima macam (Kasmir, 2014) yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan kredit

Kredit investasi. Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

Kredit modal kerja. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit produktif. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi,kredit perabot rumah tangga.

Kredit perdagangan. Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

Kredit jangka pendek. Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam.

Kredit jangka menengah. Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk.

Kredit jangka panjang. Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi sektor usaha

Kredit pertanian. Yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

Kredit industri. Yaitu Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

Kredit pertambangan yaitu Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas,minyak atau timah.

Kredit pendidikan. Yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk pembiayaan pendidikan.

Kredit perumahan. Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

5. Dilihat dari segi jaminan

Kredit dengan jaminan.Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

Kredit tanpa jaminan.Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenisini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2.1.2.6. Prinsip Pemberian Kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan analisis secara mendalam,sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit,

maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C dan 7P. Penjelasan analisis 5C (Kasmir, 2014) adalah sebagai berikut:

- 1) **Character.** Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain:
 - (1) Riwayat peminjam, (2) Reputasi dalam bisnis dan keuangan, (3) Manajemen, (4) Legalitas usaha
- 2) **Capacity.** Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka

tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.

- 3) **Capital.** Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban risiko yang mungkin dialami perusahaan.
- 4) **Collateral.** Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah *collateral* (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- 5) **Condition.** Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2013:136-137) terdapat lima faktor penilaian permohonan kredit yang perlu diperhatikan oleh Bank antara lain:

1. Kepribadian atau watak
2. Kemampuan atau kesanggupan
3. Modal atau kekayaan
4. Jaminan
5. kondisi

5.1.3. Modal

5.1.3.1. Pengertian Modal

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.

Menurut Bambang Riyanto (2010:18) pengertian modal merupakan persoalan yang tidak akan pernah berakhir, mengingat masalah modal mengandung begitu banyak aspek. Untuk mengetahui pengertian modal dalam keputusan pendanaan dapat dipahami melalui definisi-definisi modal.

5.1.3.2. Jenis Modal

- 1) **Modal Sendiri.** Menurut Riyanto (2010:21) mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal

sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan sebagainya.

Kelebihan modal sendiri adalah:

- a. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban usaha,
- b. Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal,
- c. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama,
- d. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

Kekurangan modal sendiri adalah:

- a. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relative terbatas,
- b. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya,
- c. Kurangnya motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

- 2) **Modal Asing (Pinjaman).** Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya

yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dan pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:

- a. Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintah atau perbankan asing.
- b. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi, asing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya,
- c. Pinjaman dari perusahaan non keuangan. Kelebihan modal pinjaman adalah:
 - a) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah.
 - b) Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga *image* dan kepercayaan perusahaan yang member pinjaman agar tidak tercemar.

Kekurangan modal pinjaman adalah:

- a. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, materai, dan asuransi
- b. Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung.
- c. Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar (Kasmir,2010:91).

3) **Modal Patungan.** Ambadar (2010:15) menyebutkan, selain modal sendiri atau modal pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagi kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal satu orang teman atau beberapa orang (yang berperan sebagai mitra usaha). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa modal usaha adalah sejumlah nilai pokok dari modal atau harta yang dimiliki untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh laba yang optimal sehingga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat kecil di Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang.

5.1.4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

5.1.4.1. Latar Belakang PNPM-MP

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di daerah pedesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendaya gunaan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM-MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (PTO PNPM-MP, BAPEMMAS SUMUT,2007). Pendekatan PNPM-MP merupakan pengembangan dari PPK,yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM-MP adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar

masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM-MP adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan local
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

(Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2007 : 2).

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM-MP, strategi yang dikembangkan PNPM-MP yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM-MP diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui PPK.

5.1.4.2.Tujuan PNPM-MP

Di dalam Pedoman Umum PNPM MP disebutkan bahwa tujuan Umum PNPM-MP adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi:

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendaya gunakan, sumber daya lokal.
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- 4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).
- 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

5.1.4.3.Prinsip Pokok PNPM-MP

Dalam pelaksanaannya, PNPM-MP menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari:

- 1) Transparansi dan Akuntabel, yaitu masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan.
- 2) Desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
- 3) Keberpihakan pada Orang Miskin, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- 4) Otonomi, yaitu masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- 5) Partisipasi, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- 6) Prioritas, yaitu Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendaya gunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
- 7) Kesetaraan dan Keadilan Gender, yaitu Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.

- 8) Kolaborasi, yaitu semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- 9) Keberlanjutan, yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

5.1.5. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)

1. Pengertian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)

SPKP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari SPP sebagai berikut:

- a) **Tujuan Umum.** Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin.
- b) **Tujuan Khusus.** Adapun tujuan khusus dari SPP adalah:
 - (1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
 - (2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.

(3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan

2. Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Ketentuan Kelompok SPP

a) **Sasaran program.** Sasaran program adalah Rumah Tangga Miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

BPS menyebutkan bahwa penentuan Rumah Tangga Miskin didasarkan atas kemampuan / rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan atau non makanan. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan. Secara konseptual penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non-makanan, atau setara Rp 120.000,00 per orang per bulan.

Bila diasumsikan suatu rumah tangga memiliki jumlah anggota rumah tangga (*house hold size*) rata-rata 4 orang, maka batas kemiskinan rumah tangga

(1) Rumah tangga dikatakan sangat miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 4×120 ribu = Rp 480.000,00 per rumah tangga per bulan.

(2) Rumah tangga dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai $4 \times 150\text{ribu} = \text{Rp } 600.000,00$ per rumah tangga per bulan,tetapi diatas Rp 480.000,00.

(3) Rumah tangga dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai $4 \times 175 \text{ ribu} = \text{Rp } 700.000,00$ per rumah tangga per bulan,tetapi diatas Rp 600.000,00
(Wrihatnolo.blogspot.com/2008/08, diakses 28 Oktober 2019)

b) **Bentuk Kegiatan.** Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

c) **Ketentuan kelompok SPP**

(1) Kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun.

(2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.

(3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.

(4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.

(5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana
(Penjelasan IV PTO Kegiatan SPP,BAPEMMAS. 2007).

d) **Syarat Melakukan Pinjaman SPP**

Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Kelompok

- a) Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana perguliran kegiatan SPP minimal kategori kelompok berkembang
- b) Kelompok yang telah lunas dan mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya dengan ketentuan: (1) Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, (2) Jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas II dapat jumlah yang sama dengan dengan pinjaman sebelumnya, (3) Jika mempunyai catatan tunggakan di atas kolektibilitas II dapat mengajukan maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya
- c) Kelompok *executing* dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan *channeling* (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan *executing* (dikelola secara mandiri).

2. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan

- a) Besaran jasa pinjaman ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar untuk pinjaman lembaga keuangan pada wilayah masing masing.
- b) Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*)

3. Jangka waktu pinjaman

- a) Jangka waktu pinjaman kelompok SPP maksimal 12 bulan.
- b) Khusus untuk kelompok pengelola (*executing*) maksimal 36 bulan

5.1.6. Peranan Perempuan dalam Usaha Mikro

Telah disadari bahwa peran perempuan dalam sektor ekonomi, terutama di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidaklah kecil, dan disadari oleh banyak pihak bahwa UMKM, disamping sektor pertanian, memainkan peran penting dalam menunjang ekonomi nasional.

Peran dimaksudkan sebagai pola perilaku yang ditentukan bagi seseorang yang menguasai kedudukan tertentu. Selanjutnya Menurut Rosaldo dan Lamphere (2012:1) “Antropolog feminis menyatakan bahwa pemisahan dunia publik dan domestik dan penurunan perempuan kedomestik mempertegas subordinasi perempuan”.

Achmad dalam Sumiarni (2012:1) mengatakan berdasarkan jaminan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pancasila dan UUD 1945 serta berbagai instrument internasional yang dimaksud dengan kesetaraan adalah perwujudan jaminan dalam tata hukum ke dalam pola atau hidup sehari-hari, yang ditandai oleh sikap laki-laki dan perempuan dalam hubungan mereka satu sama lain, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang saling peduli, saling menghargai, saling membantu, saling mendukung, saling memberdayakan dan saling memberi kesempatan untuk tumbuh kembang dan mengembangkan diri secara optimal dan terus-menerus, maupun untuk menentukan pilihan bidang pengabdian pada masyarakatnya dan pembangunan bangsanya serta masyarakat dunia, secara bebas dan bertanggung jawab.

Peran laki-laki dan perempuan diterima sebagai kenyataan yang statis dan tidak ada usaha untuk mempertanyakan keadilan dari peran-peran

tersebut. Peranan gender terbentuk melalui perkembangan sejarah, ideologi, agama, politik, kebudayaan dan ekonomi. Di satu sisi, perempuan sangat berpotensi untuk mengembangkan usaha. Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa perempuan pengusaha lebih bertanggung jawab dan lebih dapat dipercaya dalam masalah pengelolaan keuangan usaha, dan perempuan cenderung lebih peka terhadap kebutuhan pasar sehingga membuka peluang usaha baru. Di sisi lain, berbagai hal seperti kemudahan pembiayaan dan perijinan, akses pemasaran, masih merupakan tantangan yang besar dalam memajukan perekonomian di sector UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

5.1.7. Pendamping Program

Kelompok SPKP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang professional, akuntabel sehingga mampu menarik minta kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjamn. Pengembangan kelembagaan secara badan hhukum dapat menjadi koperasi simpan pinjam. Pendamping yang baik itu berasal dari masyarakat itu sendiri. (Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan, 2012. Jakarta KEMENDAGRI Hal. 1)

2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Turmuzi, 2012	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok SPP dengan UPK-PNPM Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rngsang Barat. Sebelum kelompok mendapat fasilitas kredit kelompok SPP harus

		Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Desa Singai Cina Kecamatan Rangsang Barat	melalui beberapa tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak UPK_PNPM Mandiri yaitu sebagai berikut: tahap persiapan, tahap pengajuan usulan pinjaman, tahap pemeriksaan usulan pinjaman, tahap pembuatan jadwal pencairan, tahap pendatanganan surat perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit.
2.	Sinta Oktavia, 2011	Analisis Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PeRDesaan(PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Cempaka Putih, Sungai Liku Tengah, Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana SPP pada kelompok Cempaka Putih belum terkelola dengan baik. Dimana belum adanya sinergi yang baik (saling mendukung) antara pihak pemberi dana (PNPM/UPK), kelompok pengelola dana, dan pengguna dana (peminjam). Begitupun halnya dengan persoalan yang terjadi pada kelompok pengelola, dimana penunggakan yang terjadi adalah sebesar 70,3 % (26 orang) dari 37 peminjam pada kelompok Cempaka Putih tidak terlepas dari kelemahan masing-masing pihak yang harusnya saling menjalankan peranannya serta saling bersinergi tersebut
3.	Isnaeni (2018)	Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Di Kecamatan Purwojati Kabupaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) ada suatu pemberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya kaum perempuan

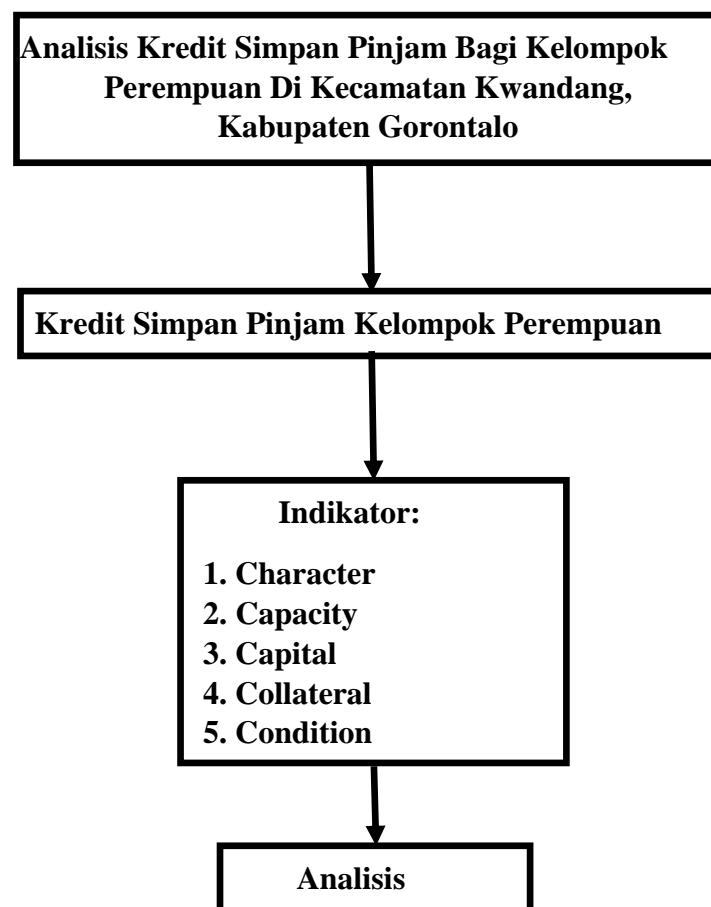
		Bayumas	di Kecamatan Purwojati, Banyumas. Perubahan yang dapat dirasakan oleh pemanfaat kegiatan SPP yakni kaum perempuan yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki pekerjaan dan mayoritas membuka usaha dagang dari hasil pinjaman dana dari SPP, dan kini mereka mampu lebih produktif serta dapat membantu perekonomian keluarga.
--	--	---------	---

2.3. Kerangka Pikir

Pelaksanaan program Simpan Pinjam bagi Perempuan akan berpengaruh pada kreativitas ibu rumah tangga dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah karena Simpan Pinjam bagi Perempuan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu, khususnya para perempuan dan ibu-ibu rumah tangga agar dapat berwirausaha dan ikut menjaga kestabilan perekonomian keluarga.

Agar dapat diketahui Program Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Di Desa Bualemo Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Program Kredit Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan Di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Sunyoto (2016) metode penelitian akan menentukan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematik.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu dan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

3.2.1. Desain penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran yang sistematis, factual dan akurat serta

objek tentang Program Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan Pada Pendapatan Usaha Mikro Kecil.

3.2.2. Operasional Variabel

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C (Kasmir, 2014) adalah sebagai berikut:

1) **Character.** Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan.

Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain:

(1) Riwayat peminjam, (2) Reputasi dalam bisnis dan keuangan, (3) Manajemen, (4) Legalitas usaha

2) **Capacity.** Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat

berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.

- 3) ***Collateral.*** Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah *collateral* (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- 4) ***Condition.*** Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- 5) ***Capital.*** Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban risiko yang mungkin dialami perusahaan.

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Sub Variabel	Indikator
Analisis Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	<i>Character</i>	Sistem Pemberian Kredit
	<i>Capacity</i>	Mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya
	<i>Collateral</i>	Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan
	<i>Condition</i>	Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai
	<i>Capital</i>	Tanggungjawab dalam Pinjaman (modal)

Sumber: Kasmir (2014)

3.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang tampak pada perilaku ibu-ibu/perempuan dalam program simpan pinjam kelompok perempuan. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Dalam pendekatan kualitatif, peneliti menjadi instrument penting dalam penelitian dimana pengumpulan dan analisis data dilakukan sendiri oleh peneliti.

Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, maupun informasi audiovisual yang diperoleh langsung dari informan. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran perilaku ibu-ibu/perempuan dalam program simpan pinjam kelompok perempuan di desa Bualemo dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Melalui pendekatan ini juga peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi di lapangan terkait dengan tujuan penelitian.

3.4. Informan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan informan sebagai sumber data dan informasi penelitian. Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang terkait dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti (Sugiyono, 2016).

Syarat pengambilan sampel purposive sampling yakni sampel yang diambil sebagai subjek penelitian dimana sampel ini yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sampel dalam penelitian dimana mereka yang terlibat langsung dalam

tema penelitian yakni pemberian kredit dalam SPKP. Dan sudah beberapa kali menerima dana untuk dicairkan kepada anggota kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti menetapkan 3 informan untuk dijadikan informan penelitian. Sebelum melakukan penggalian data, peneliti terlebih dahulu meminta kesediaan informan sekaligus menjelaskan tujuan penelitian.

Tabel Informan

No	Nama	Umur (Tahun)	Jabatan	Jmlh
1	Olga Kasim	35	Ketua SPKP	1
2	Sirhan Salimo	33	Ketua Kelompok Desa Poso	1
3	Mano Ahmad	31	Ketua kelompok Desa Bualemo	1
Jumlah				3

3.5. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017), bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

- 1) Data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan kelompok perempuan yang menjadi pelaku simpan pinjam.
- 2) Data sekunder. Menurut Sugiyono (2016), data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul

data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu.

3.6.Teknik Pengumpulan Data

Dalam jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016). Untuk mencapai tujuan penulisan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yang lazim digunakan oleh peneliti kualitatif lainnya yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

1. Wawancara.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong, 2014). Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang perilaku kelompok simpan pinjam. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan

namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono,2016).

2. Observasi

Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi sangat dibutuhkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014) menyatakan salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian terutama informan.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala rekaman hasil wawancara serta cacatan baik berbentuk catatan

dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*), artikel, media massa , foto, dan lainnya.

3.7.Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Proses analisis data menurut Sugiyono (2016) yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita, rekaman biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis (Sugiyono, 2016).

2. *Data reduction* (Reduksi data)

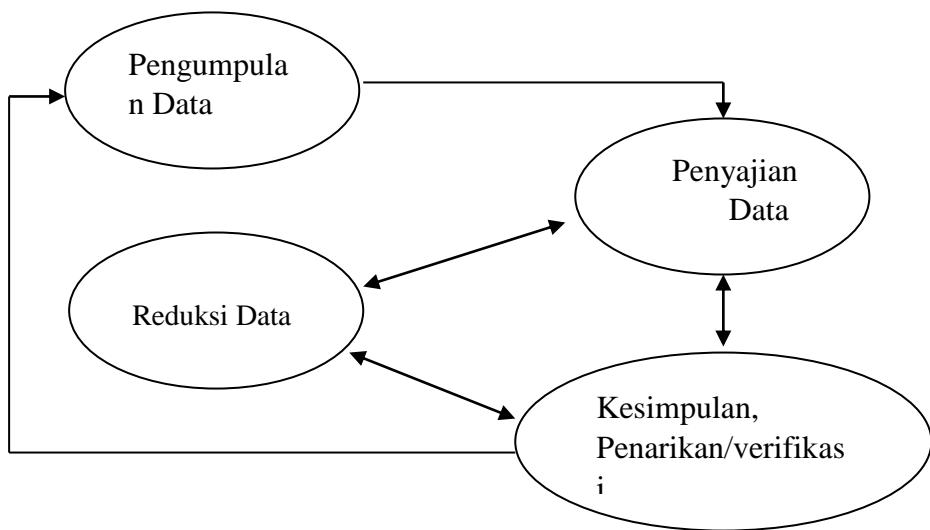
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016).

3. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016).

4. *Conclusion drawing* (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta diuji validitasnya.



Gambar 3.1
Komponen Analisis Data: Model Interaktif Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dalam PNPM_MP

“PNPM Mandiri dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi tengah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan , PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program penaggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan diantara bentuk pengolahan dana PNPM Mandiri Pedesaan adalah melalui pemanfaatan simpan pinjam untuk perempuan”. (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan)

Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berada dibawah binaan Direktorat Peberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaanyang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan dari Bank Dunia.

Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi

sumber daya yang ada dilingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaanya,
2. Pelembagaan system pembangunan partisipatif,
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local,
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasaran dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat,
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan, strategi yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri Pedesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan system pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

PNPM Mandiri Pedesaan masuk di Desa Boalemo pada tahun 2011 dan disertai dengan adanya program SPP. Dalam salah satu tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat miskin atau kelompok perempuan. Dan adanya kesetaraan gender, yang berarti masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya untuk pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, dan membantu perekonomian masyarakat miskin yang produktif.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Pemberian Kredit

Menurut pedoman teknis pinjaman. Pemberian pinjamn diberikan agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pinjaman bergulir, maka peminjam disini perlu melewati beberapa prosedur pemberian pinjaman oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Peneliti menangkap sebuah pemahaman dari gejala yang ditampak, bahwa pinjaman kredit merupakan kepercayaan yang diberikan pada penerima kredit dalam memenuhi kewajibannya. Kepercayaan ini kemudian diberlakukan pada proses atau alur sistem pemberian pinjaman kredit di SPKP Kecamatan Kwandang. Pemahaman ini diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu informan yang bertanggungjawab sebagai ketua SPKP di Kecamatan Kwandang. Ibu Olga juga adalah salah satu dosen LB di salah satu Universitas Swasta di Gorontalo.

“untuk sistem pemberian pinjaman itu kan ada alurnya yakni yang pertama yaitu kita melakukan identifikasi atau verifikasi kelompok dari tiap desa yang mengusulkan, kedua yaitu memverifikasi dilhat dari usaha-usaha mereka, itukan usaha kelompok tapi disatu kelompok itu ada beberapa orang, namun yang bertanggungjawab disitu adalah ketua kelompok atau pengurus, ketiga yaitu setelah diverifikasi kelompok tersebut, kami akan mengklarifikasi apakah layak atau tidak kelompok ini mendapatkan pinjaman atau dana guliran simpan pinjam kelompok perempuan, keempat yaitu setelah diverifikasi apa sudah layak usahanya, kami segera akan menyalurkan pinjaman tersebut, namun pencairannya itu tidak sesuai dengan yang mereka usulkan, karena prosedurnya mereka menajukan lewat proposal, kemudian jumlah yang tertera diproposal itu sesuka hati mereka, namun kami mengklarifikasi dilihat dari segi usaha, karena setiap anggota kelompok usahanya berbeda-beda dan pendapatannya juga pasti berbeda. (Ibu Olga).

Selanjutnya ibu Olga menjelaskan;

“kamipun pada saat memverifikasi melakukan yang namanya wawancara, karena itu juga akan menjadi acuan ataupun perbandingan pada saat akan disetujui pemberian pinjaman ini”.

Kredit PNPM yang salurkan pada SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) ini diberikan bukan perorangan tetapi secara kelompok. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan kredit harus membentuk kelompok terlebih dahulu agar bisa mendapatkan dana bantuan. Pembentukan kelompok sepenuhnya diserahkan pada masyarakat yang ditunjuk sebaai kelompok sasaran. Namun biasanya masyarakat yang akan mengajukan kredit atau pinjaman harus sudah mempunyai kelompok minimal 1 tahun.

Dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh ibu Olga, adapun pemahamannya berdasarkan pengalaman tentang alur anggota dalam proses untuk mendapatkan pinjaman, serta proses pengajuannya yakni diungkapkan oleh ibu Olga bahwa:

“alurnya itu dari kelompok mengajukan proposal, proposal itu yang sudah disetujui oleh kepala desa kemudian dimasukkan ke pengurus SPKP yang ada di kecamatan, setelah proposalnya diterima kemudian akan diverifikasi kelompok tersebut. Nah,, kelompok ini kan terdiri dari beberapa anggota, setelah diverifikasi, kemudian diwawancarai seorang demi seorang anggota kelompok tersebut. Setelah itu akan diklarifikasi kembali apakah hasil wawancara itu sudah sesuai dengan proposal yang mereka ajukan dan dilihat juga besaran pinjaman mereka yang diajukan dalam proposal. Setelah itu diadakan rapat oleh pengurus UPK mengenai hasil verifikasi kelompok tersebut, apakah sudah layak dipinjamkan pinjaman atau bagaimana. Nah,, hasilnya kan kelihatan dari hasil wawancara anggota kelompok, setelah diputuskan atau ditentukan oleh TIM pendanaan, mereka itu dapat pinjaman sesuai dengan hasil

wawancara kemudian akan disalurkan dana tersebut. Kemudian akan kembali kedesa untuk melakukan pencairan dana kepada anggota kelompok yang disponsori oleh ketua kelompok”.

Pemahaman berikutnya yang dijelaskan ibu Olga:

“proses pengajuannya itu melalui proposal, jadi alurnya itu mereka memasukkan atau menagjukan proposal yang sudah disetujui oleh kepala desa, ditanda tangani kepala desa, ketua kelompok, dan anggota kelompok kemudian dimasukkan ke UPK atau TIM pengelola SPKP yang ada di Kwandang”.

Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa sistem pemberian kredit ini harus melalui proses yang sudah ditetapkan oleh tim dari pengelola simpan pinjam. Hal ini didasarkan pada argument dari informan Ibu Olga bahwa pada dasarnya sistem pemberian kredit di simpan pinjam kelompok perempuan yang dikelola oleh tim kami akan melalui beberapa alur atau proses. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa tim pengelola simpan pinjam ini telah menggunakan prosedur pinjaman kredit sesuai dengan pedomannya.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. (Kasmir 2014). Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Berkas-berkas

Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dihampiri dengan berkas-

berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya mencakup latar belakang yang meliputi riwayat hidup singkat usahanya, jenis bidang usaha, identitas usaha, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan usahanya serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka peminjam diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

c. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk menyakini berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

d. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Dari data hasil penelitian dapat dilihat bahwa prosedur sistem pemberian kredit pinjaman pada simpan pinjam kelompok perempuan ini sudah sangat baik

dibuktikan dengan penjelasan pihak yang terkait dalam hal kredit yakni memenuhi penilaian kredit dengan baik.

2. Mengetahui Kesungguhan Nasabah Melunasi Hutangnya.

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Pengembalian kredit dapat dilihat dari kondisi kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi besarnya penyisihan untuk cadangan aktiva produktif dan berpengaruh juga pada modal usaha itu sendiri.

Adapun pemahaman yang penulis dapatkan dari informan Ibu Olga tentang bagaimana ibu mengetahui calon nasabah atau peminjam ini bersungguh-sungguh melunasi pinjamannya. Beliau mengatakan:

“dilihat dari proses alur pemberian pinjaman yang saya jelaskan tadi, itulah yang jadi prosesnya dan kami juga percaya mereka bisa melunasi pinjaman karena sudah dilakukan interview/wawancara sebelumnya. Dan ada juga penanggungjawab disitu yaitu ketua kelompok, kami selaku pengelola SPKP kecamatan tentunya kami tidak menerima langsung pengembaliannya dari anggota tersebut, namun kami menerima angsuran atau pembayaran bulanan itu dari ketua kelompok”

Data wawancara yang diberikan yakni kepercayaan merupakan salah satu hal terpenting dalam pemberian kredit. Ini dipertegas dengan jawaban informan bahwa mereka percaya akan pengembalian dari nasabah atau peminjam. Secara umum kredit adalah pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur untuk

meningkatkan usahanya untuk mencapai keuntungan yang dicita-citakan. Sehingga pada hakikatnya para nasabah atau peminjam harus mengetahui tanggungjawabnya dalam hal melunasi ataupun mengembalikan pinjaman. Kredit adalah penyerahan barang dan jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/ atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hasil wawancara ini menjelaskan kredit diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga dalam hal pemberian kredit harus ada namanya kepercayaan. Hal ini dipertegas dengan penjelasan oleh Rivai, (2006) mengenai unsur-unsur pemberian kredit yakni adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis atau berupa jaminan penyerahan barang.

Adapun unsur–unsur kredit (Kasmir, 2014);

- a. **Kepercayaan.** Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
- b. **Kesepakatan.** Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing–masing.

- c. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktuini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktutersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah(1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktumerupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakatikedua belah pihak.
- d. Risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akanmemungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatukredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besarrisikonya, demikian pula sebaliknya.
- e. Balas jasa.Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberiansuatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasadalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biayaadministrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

Selanjutnya pertanyaan informan mengenai perihal terjadi kredit macet.Jika terjadi kemacetan, apakah ada usaha dari peminjam untuk melunasi?

“dilihat dari prosedurnya, ada namanya form atau ada format pertanyaan terkait dengan apabila yang pertama peminjam tidak layak mendapatkan pinjaman, kira-kira menurut anggota itu apakah mereka dapat melunasi atau tidak, yang kedua apabila terjadi peminjam tidak bisa melunasi karena ada hambatan/ musibah, kami akan menyediakan solusi, dimana mereka nanti aka noda sanksi, misalnya sanksi administrasi atau catatan dari penagihan sebelumnya, yakni collect 1, 2 dan 3 yang artinya telat 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Bilaman peminjam sudah mencapai collect 3 atau sudah macet 3 bulan, pastinya pelaku atau pengelola SPKP itu sudah turun langsung kelapangan untuk mencari mengapa bisa terjadi macet di angsuran

kelompoknya. Dari situ kami akan mengetahui masalah-masalah kenapa bisa terjadi macet, namun dikelompok juga itu ada simpanan mereka karena simpanan mereka disimpan dikelompok, sehingga ketua kelompok bisa menanggulangi/menutupi kemacetan yang ada. Setelah itu bulan berikutnya lagi, mungkin ada lagi yang menunggak, maka kami akan memberikan sanksi berupa mereka IPTW (Insentif Pembayaran tepat Waktu), sehingga mereka tidak akan mengulangi keterlambatan pinjaman”

Munculnya kredit bermasalah termasuk didalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur maupun debitur. Dalam proses pelunasan kredit tidak selamanya berjalan lancar. Beberapa hambatan dialami oleh para peminjam.

Dari hasil wawancara diatas dengan informan Ibu Olga, dilihat bahwa terjadinya kredit macet atau keterlambatan bukan karena terjadinya berdasarkan satu objek masalah saja melainkan dari objek lain yakni usaha mereka. Masalah pengembalian pinjaman dirasakan sulit oleh para peminjam adalah ketika usaha mereka sedang mengalami hambatan. Sehingga proses penarikan kredit juga sering mengalami hambatan.

Lain halnya dengan penuturan informan yang bertanggung jawab sebagai ketua kelompok pinjaman kredit. Ibu Mano dalam hal menceritakan mengenai kredit macet yang sering dia alami pada kelompoknya. Peneliti kemudian memberi pertanyaan tentang evaluasinya untuk penyetor yang lancar dan yang macet. Penuturan informan sebagaimana tergambar dalam penjelasan berikut:

“evaluasi atau monitoringnya, tentunya kalau mereka punya setoran itu lancar, tentunya kelihatan dari ketua kelompok. Yang kami tahu

dari pengurus itu, kalau mereka menyetor sesuai tanggal dan sesuai jumlah berarti masuk kategori lancar tapi bilamana mereka menunggak, dan kalau sudah masuk 3 bulan terlambat maka pengurus akan turun langsung untuk evaluasi langsung apakah ada kendala dalam pembayaran atau bagaimana tapi di evaluasi melalui ketua kelompok, kemudian nanti ketua kelompok yang bertemu dengan anggota lain. Nah,, dari situ ketahuan apa alasannya anggota ini tidak menyetor sehingga jadi kendala ketua kelompok menyetor ke UPK, karena UPK juga tidak mau menerima setoran itu yang kurang. Ketua kelompok akan menyetor ke UPK kalau anggota sudah lunas semua membayar. Jadi akan ketahuan kalau siapa anggota yang belum menyetor ke ketua kelompok. Namun untuk selanjutnya tetap mereka itu bertanggungjawab atas pelunasan setoran melalui ketua kelompok, dengan catatan apabila pinjaman sudah lunas mereka tidak mendapat insentif. Intinya kalau lancara tidak perlu dievaluasi tapi kalau sudah menunggak 3 bulan baru tim akan turun untuk mengevaluasi”. (ibu Mano).

Pemahaman yang dijelaskan informan ibu Mano merupakan penjelasan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh tim pengelola kepada mereka penyetor yakni dengan cara memonitoring perkembangan ini pada ketua kelompok. Ketua kelompok dalam hal ini lebih dulu harus mengetahui kendala apa sehingga anggotanya bisa mengalami kredit macet.

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of landing yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelola pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan.

Program yang dilakukan oleh PNPM Mandiri yakni Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini juga punya kelompok yang tidak pernah terlambat dalam hal mengasur kredit pinjaman mereka bahkan sering mendapatkan insentif dari ketua kelompok mereka karena melakukan pembayaran tepat waktu. Hal ini dapat dipertegas dengan pahamanan yang diberikan oleh Ibu Sirhan yang tanggung jawabnya sama dengan ibu Mano yakni ketua kelompok, bahwa:

“angsuran pembayaran dalam kelompok kami selama ini selalu tepat waktu, sampai kami sering mendapatkan insentif karena melakukan pembayaran tepat waktu. Nah,, kami juga tidak luput dari bagaimana selalu memonitoring anggota-anggota yang lain, berupa perkembangan usahanya apa masih lancar atau bagaimana, kadang kala juga selalu bertanya apa ada kendala lain, sehingga dari pihak ketua bisa mengambil solusi tersebut”. (Ibu Sirhan)

Insentif pengembalian tepat waktu (IPTW) dalam kelompok SPKP mempunyai criteria tersendiri. Hal ini dipertegas dengan penjelasan bahwa adapun kriteria insentif pengembalian tepat waktu adalah sebagai berikut:

- a) Angsuran masuk ke UPK tepat waktu setiap bulannya (sesuai dengan tanggal pencairan)
- b) Apabila tanggal/hari jatuh tempo angsuran hari libur maka angsuran mundur tiga hari
- c) Tidak ada keterlambatan dan tunggakan angsuran ke UPK
- d) Angsuran yang masuk ke UPK harus sesuai dengan kewajiban angsuran satu kelompok.

3. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

Peniliti mendapatkan pemahaman dari ibu Olga tentang apakah dalam peminjaman ini perlu adanya jaminan? Jika ada, apa jaminannya?. Beliau menceritakan bahwa:

“Memang awalnya SPKP berjalan, itu memang ada jaminan contohnya barang-barang rumah tangga yang berharga dari jaminan mereka. Apabila mereka memberikan jaminan, maka itu akan diinventarisir kemudian difoto dan disaksikan juga oleh ketua kelompok, misalnya anggota A, pinjamannya berapa dan jaminannya seperti apa.”

Adapun tambahan penjelasan dari ibu Olga:

“jaminan yang akan mereka berikan juga harus melebihi standar pinjaman mereka, misalnya pinjaman mereka Rp. 500.000,- jadi harga jaminan itu juga harus diatas nominal itu karena nantinya suatu saat barang jaminan ini akan kami adakan lelang baran”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Olga diketahui bahwa SPKP di Kecamatan Kwandang menggunakan sistem pemberian jaminan dari nasabah. Jaminan ini berupa barang berharga yang nilai jualnya harus melebihi nilai nominal dana yang akan di pinjam yang sudah tertera pada proposal peminjam. Hal ini dapat ditegaskan melalui kredit yang dengan jaminan.

Kredit dengan jaminan. Diindonesia kredit ini tidak lazim dipakai terutama bagi perusahaan besar dan kuat. Dalam kredit ini, jaminan kredit yang dimaksud adalah jaminan fisik dari prospek usaha debitur. Pada kegiatan pemberian kredit yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya dengan jangka waktu pemberian kredit, karena maksimal jangka waktu pelunasan kredit yaitu 1 tahun.

Dilihat dari segi jaminan kredit jaminan terbagi atas dua bagian;

1. Kredit dengan jaminan. Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.
2. Kredit tanpa jaminan. Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

Membicarakan mengenai jaminan merupakan salah satu penilaian dalam proses tidak diterimanya dana pinjaman dari pihak kredit. Adapun ini tampak dari penuturan informan mengenai apakah perlu diketahui nilai dari jaminan ini?

“iya, memang harus diperlihatkan. Misalnya jaminan kursi 1 set, disitu kami akan kalkulasi kira-kira berapa harga jual kursi itu, apabila harga jual tidak setara dengan pinjaman pastinya kami akan minta tambahan jaminan lagi”. (ibu Olga)

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa peminjam pada saat pengajuan kredit harus memperlihatkan barang jaminan yang akan menjadi salah satu syarat dalam proses tidak layaknya pengajuan pinjaman ini diterima. Ini diperkuat dengan penjelasan oleh ibu Olga bahwa peminjam harus memperlihatkan jaminan contoh barang jaminan ini yakni barang rumah tangga yang mempunyai nilai jual yang tinggi.

Sehingga dapat disimpulkan jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada tim pengelola pinjaman hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akantetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan analisis secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh pinjaman, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga.

Prinsip-prinsip kredit dalam bukunya Kasmir, (2014:101) untuk mendapatkan kredit arus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 5C yaitu:

- a. *Character* (Kepribadian/watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohonan untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit.

c. *Capital* (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan pada pihak pemberi kredit oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan.

e. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari usaha yang memperoleh kredit.

Oleh karena itu, dalam proses pemberian kredit, harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.

4. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredittersebut bermasalah relatif kecil. Sebagaimana penuturan peneliti apakah ada penilaian tersendiri dalam usaha peminjam?

“tentunya, ini kan mereka mininjam di SPKP itu untuk usaha mereka sehingga menjadi penilaian oleh tim verifikas, namun sudah ada juga tertera jenis usahanya didalam proposal pengajuan pinjaman. Contoh pertama disitu mereka usahanya jual pulsa, pada saat sebelum disetujui atau tidak adanya wawancara terlebih dahulu oleh tim yaitu usaha jual pulsa ini kira-kira modalnya berapa? Karena didalam proposal tidak penilaian sehingga tim perlu menanyakan hal tersebut kepada peminjam. Kedua misalnya dia punya kios dan kantin. Usaha kantin ini akan ditanya, menjual apa saja, agar kami tim pengelola SPKP sudah bisa melihat seperti apa usaha itu dan penghasilan bulananya bisa kami lihat juga”. (ibu Olga)

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Olga diketahui bahwa para nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di SPKP akan melewati penilaian dari tim verifikasi. Hal ini merupakan prosedur yang tertera dalam proposal pinjaman pada saat nasabah ingin mengajukan pinjaman. Penilaian usaha disini bisa dilihat dari jenis usaha yang ditulis dalam proposal pengajuan pinjaman. Penilaian kredit dengan menggunakan 7P (Kasmir, 2008) adalah sebagai berikut:

- 1) *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakusehari-hari maupun kepribadian masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaiakannya.

- 2) *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) *Purpose* yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan, sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.
- 4) *Prospect* yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pihak bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
- 5) *Payment* yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- 6) *Profitability* yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- 7) *Protection* yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang

diberikan benarbenaraman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminanbarang atau jaminan asuransi.

Dari wawancara diatas informan menambahkan penjelasan:

“form wawancara itu kurang lebih ada 23 item pertanyaan wawanara. Untuk penilaian usaha akan dilakukan oleh tim SPKP sedangkan untuk penilaian personal anggota itu akan dilihat oleh ketua kelompok, karena ketua yang selalu berkecimpung dengan usaha-usaha anggotanya”. (Ibu Olga)

Berdasarkan penjelasan wawancara dapat diketahui bahwa penilaian bidang usaha dari para peminjam atau nasabah sudah dilakukan dari awal oleh tim verifikasi. Penilaian usaha ini juga tidak serta merta dinilai hanya dari usahanya melainkan pemilihan ketua yang nanti akan bertanggungjawab pada usaha-usaha yang akan jadi jaminan dari peminjam. Penilaian dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemohon atau peminjam, kemudian mengumpulkan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan peminjam atau nasabah, baik data intern maupun data ekstern. Penilaian juga harus diperiksa segi kebenarannya dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan debitur dan informasi seperti kondisi usaha peminjam.

5. Tanggungjawab dalam pinjaman

Kredit SPKP yang dikelola oleh PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Dengan kata lain pemberian kredit ini bagi pedagang golongan ekonomi lemah sebagai upaya pengembangan usaha yang diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Usaha ini dilakukan oleh beberapa kelompok sehingga ada ketua yang nantinya akan

bertanggungjawab sepenuhnya. Peneliti memberikan satu pertanyaan kepada informan Ibu Olga mengenai siapa yg bertanggungjawab dalam pinjaman kredit ini?

“untuk penanggungjawab tentunya, karena itu adalah usaha kelompok jadi yang bertanggungjawab itu adalah ketua kelompok. Kami dari pengelola tidak mau tau ada anggota yang macet, yang kami tau tiap bulan ada angsuran sesuai tanggal dan sesuai jumlah masuk”.

Dari penjelasan informan diatas dapat diketahui bahwa tanggungjawab dalam hal dana pinjaman ini adalah ketua kelompok karena ini merupakan simpan pinjam yang dilakukan oleh kelompok. Ini dipertegas dengan penjelasan ibu Olga bahwa yang sepenuhnya harus bertanggungjawab disini adalah ketua kelompok. hasil wawancara ini menjelaskan Pembentukan kelompok dilakukan untuk memenuhi syarat agar bisa menjadi peminjam dana SPKP. Pembentukan kelompok sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Untuk menjadi peminjam dana SPKP ini usia kelompok minimal 1 tahun. Setelah kelompok dibentuk harus ditentukan pengurus kelompok antara lain ketua, bendahara dan sekretaris. Selain mempunyai kelompok syarat lainnya yang setiap anggota simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) harus mempunyai usaha yang produktif. Dikecamatan Kwandang sendiri jenis usaha yang ikut menggunakan dana ini antaralain usaha warung, took, dagang jajanan pasar, menjual alat rumah tangga, furniture, dll. Selain itu kelompok harus memiliki administrasi pembukuan yang sederhana akan tetapi tertib dan teratur. Sehingga dapat disimpulkan tanggungjawab ini dilakukan oleh ketua kelompok berdasarkan kriteria dari setiap anggota-anggota pelaku usaha.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sistem Pemberian Kredit pada SPKP di Kecamatan kwandang bahwa sistem pemberiannya itu dilakukan melalui beberapa alur yakni mulai dari idnetifikasi, verifikasi, mengklarifikasi dan terkair menyalurkan dana.
2. Mengetahui Kesungguhan Nasabah Melunasi Hutangnya di SPKP di Kecamatan kwandang bahwa kesungguhan ini dinilai pada saat dilakukan interview atau wawancara. Dari pernyataan peminjam akan timbul rasa percaya oleh tim pengelola.
3. Jaminan Hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan untuk SPKP di Kecamatan kwandang bahwa jaminannya ini akan diperlihatkan pada saat mengajukan, jaminan ini juga nilainya harus lebih tinggi dari pinjaman.
4. Penilaian Kondisi atau prospek Bidang Usaha yang dibiayai pada SPKP di Kecamatan kwandang bahwa penilaian ini akan dilihat pada proposal pengajuan pinjam oleh peminjam.
5. Tanggungjawab dalam pinjaman untuk SPKP di Kecamatan kwandang bahwa tanggungjawab ini dilakukan oleh ketua kelompok.

6. Kelebihan dari program SPKP ini ialah sangat membantu perekonomian masyarakat kecil khususnya perempuan dalam hal perkembangan usaha rumahan.
7. Kekurangannya yakni masih ada beberapa anggota kelompok peminjam yang menggunakan dana bantuan ini bukan pada tempatnya.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada pihak PNPM khususnya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) agar senantiasa mempertahankan kredibilitas dalam peminjaman modal dana untuk usaha masyarakat ekonomi lemah dan lebih memperhatikan pada aspek dana yang sudah dicairkan apakah telah digunakan dengan semestinya.
2. Di sarankan bagi peneliti selanjutnya, hendaknya meneliti lebih mendalam tentang pengelolaan kredit macet dana simpan pinjam ini khususnya untuk pengelolaan dana bergulir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar, Jackie. 2010. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Anis, Masruroh. 2016. Pengaruh Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Bagi Perempuan (Spp) Terhadap Tingkat Kreativitas Ibu Rumah Tangga Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah Di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Lampung Timur Tahun 2016. Skripsi. Lampung Timur.
- Bambang, Riyanto. 1997. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta. BPFE.
- Isnaeni. 2018. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Skripsi. Bayumas.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kasmir. 2008. Dasar-Dasar Perbankan. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Kasmir. 2010. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2014. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiyatmo. 2008. *Kewirausahaan*. Jakarta: Yudhistira. PT Alfabet

- Riki, T. K. 2014. Pengaruh Pinjaman Modal Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) Program Pnpm Mandiri Perdesaan Serta Sikap Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kec. Ambal Kabupaten Kebumen. Skripsi. Kebumen.
- Rosaldo, M., Lamphere, L., & Bamberger, J. (2012). *Woman, culture, and society*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Suyatno. 2007. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
2007. Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.